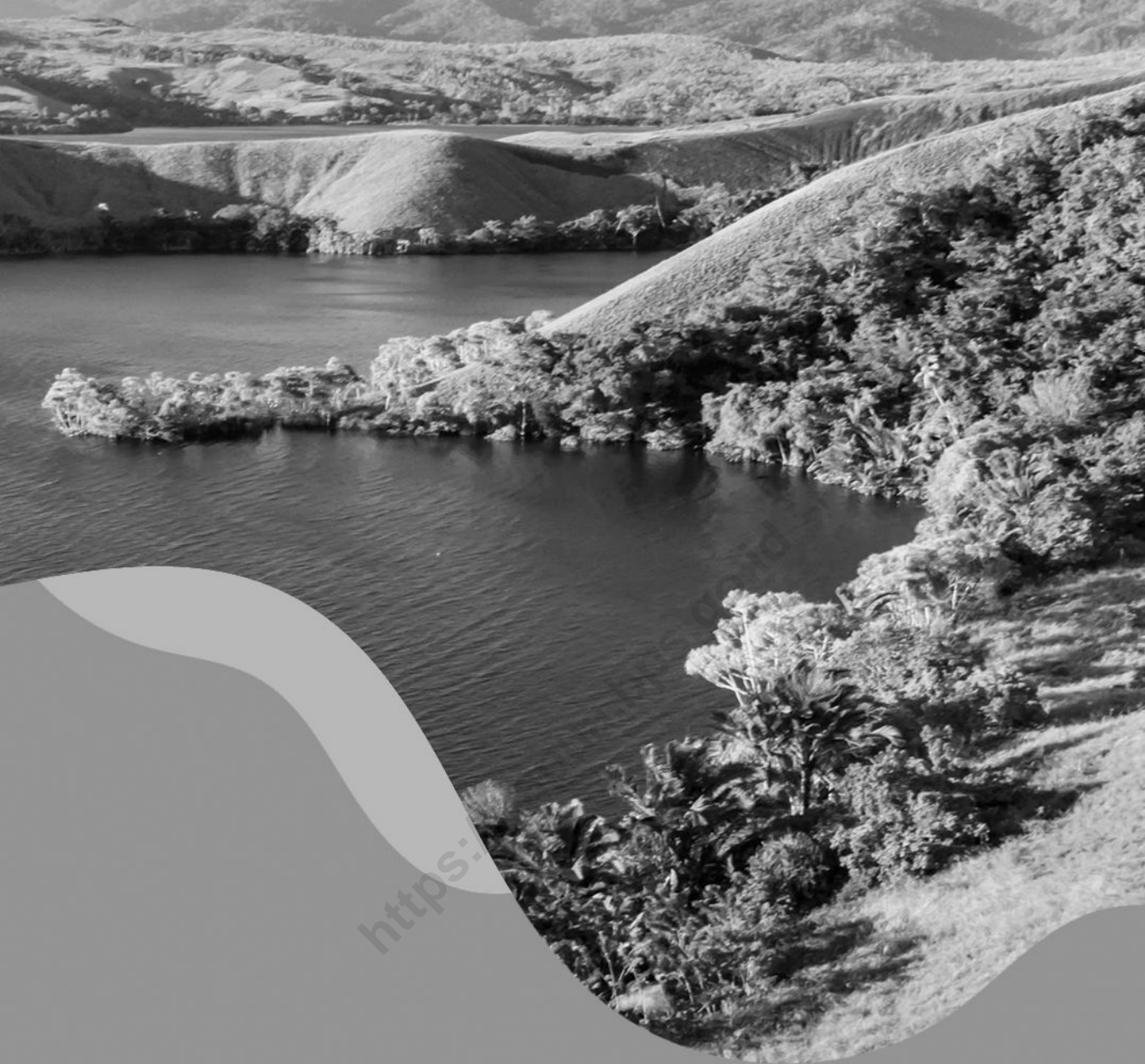


INDIKATOR **PENTING** PROVINSI PAPUA

Edisi April 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**



<https://>

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi April 2021



©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI APRIL 2021

ISSN : 2477-4472
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94000.2122

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021
xiv + 61 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik.

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi April 2021

Pengarah : Adriana Helena Carolina, SE., MM

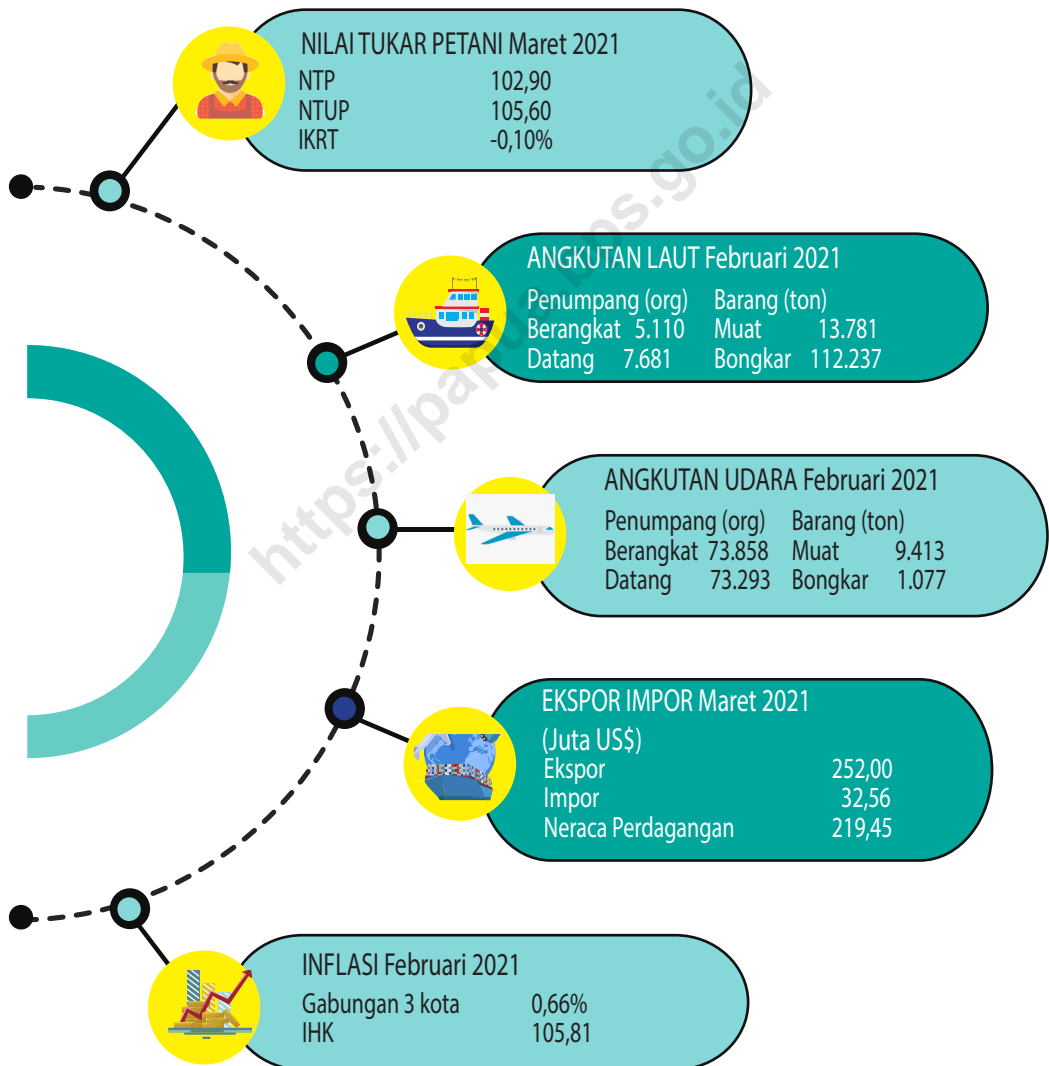
Editor : Sugiyanto, S.ST, M.Si
Lia Pujjalarasari, S.ST
Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Penulis : Vierga Dea Margaretha Br. S.Si

Pengolahan Data : Vierga Dea Margaretha Br. S.Si

Penyiapan Draft : Vierga Dea Margaretha Br. S.Si

HEADLINE



PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Impor, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, IDI, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, April 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,



Adriana Helena Carolina SE, M.M

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	
Penduduk	3
Kemiskinan	6
Ketimpangan	9
Indeks Demokrasi Indonesia	10
Ketenagakerjaan	11
Indeks Pembangunan Manusia	13
Indeks Kebahagiaan	16
Potensi Desa (PODES)	18
EKONOMI DAN PERDAGANGAN	
Inflasi (<i>update</i>)	23
Produk Domestik Regional Bruto	25
Ekspor (<i>update</i>)	28
Impor (<i>update</i>)	30
Nilai Tukar Petani (<i>update</i>)	32
Angkutan Laut (<i>update</i>)	35
Angkutan Udara (<i>update</i>)	37
Industri Manufaktur	39
Pola Distribusi Perdagangan	41
PERTANIAN	
Tanaman Pangan	45
PENJELASAN TEKNIS	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua Maret 2013-September 2020 (rupiah)	8
Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Papua	12
Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2017	17
Tabel 4. Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua	23
Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	24
Tabel 6. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2020	26
Tabel 7. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2020 Provinsi Papua	27
Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Januari-Maret 2021	28
Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Januari-Maret 2021	30
Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian menurut subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Februari-Maret 2021 (2018=100)	34
Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021	35
Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021	36
Tabel 13. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021	37
Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021	38
Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	40
Tabel 16. Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2019	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020	3
Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020	4
Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2012–September 2020	7
Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Maret 2013–September 2020 (rupiah)	8
Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2009-2019	10
Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, 2018-2020	12
Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2020	14
Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2020	15
Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018	19
Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan I-2018 – Triwulan IV-2020	26
Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-Maret 2020/2021* (Juta US\$)	29
Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-Maret 2021*	31
Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Januari-Maret 2021(2018=100)	32
Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Januari-Maret 2020/2021 (2018=100)	33
Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	39
Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2020	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Edisi April 2021

1. Inflasi

- Pada bulan Maret 2021, tercatat 3 gabungan kota HK di Papua mengalami inflasi 0,66 persen.
- Inflasi terjadi di 3 kota HK di Papua, yaitu Kota Jayapura sebesar 1,07 persen, Timika sebesar -0,41 persen dan Merauke sebesar 0,85 persen.

2. Nilai Tukar Petani

- Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada Maret 2021 sebesar 102,90 atau menurun -0,10 persen dibandingkan Februari 2021.
- Komponen Pembentuk NTP yaitu Indeks Harga Diterima Petani (It) sebesar 108,13 dan Indeks Harga Dibayar Petani (Ib) sebesar 105,08.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Papua sebesar 105,60.

3. Transportasi

a. Transportasi Laut

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Februari 2021 dengan moda angkutan laut sebanyak 5.110 orang. Secara kumulatif, penumpang yang berangkat pada Januari-Februari 2021 sebanyak 13.910 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Februari 2021 dengan moda transportasi angkutan laut sebanyak 7.681 orang. Secara kumulatif, penumpang yang datang pada Januari-Februari 2021 sebanyak 20.851 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Februari 2021 sebanyak 13.781 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Februari 2021 sebanyak 112.237 ton.

b. Transportasi Udara

- Sejak bulan Februari 2021, BPS Provinsi Papua merilis data mengenai perkembangan transportasi udara.
- Data transportasi udara mencakup Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Mozes Kilangin di Mimika.
- Sehubungan dengan ditetapkannya sistem New Normal karena pandemic COVID-19 masih berlangsung, maka pemerintah menyusun regulasi yang mengatur moda transportasi udara selama masa pandemic seperti mengi-

si aplikasi e-hac, menunjukkan hasil tes PCR/rapid test dan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM).

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Februari 2021 dengan moda angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 73.858 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Februari 2021 dengan moda transportasi angkutan udara dalam negeri di 3 bandara sebanyak 73.293 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Februari 2021 sebanyak 9.413 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Februari 2021 sebanyak 1.077 ton.

4. Ekspor dan Impor

- Ekspor Papua pada Maret 2021 tercatat senilai US\$ 252 juta. Ekspor bulan ini hanya berupa ekspor non migas.
- Dilihat menurut ekspor golongan HS 2 digit, maka ekspor golongan Biji Tembaga dan Konsentrat (HS26) menjadi primadona ekspor dari Papua dengan nilai ekspor mencapai US\$247,51 juta.
- Total ekspor yang ditujukan ke enam negara tujuan utama (Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India dan Filipina) nilai ekspornya mencapai US\$252 juta sedangkan ekspor yang dilakukan ke negara lain tidak tercatat adanya ekspor.
- Terkait dengan penutupan aktivitas lintas batas negara antara Indonesia dan Papua New Guinea sejak 2020 sebagai dampak adanya pandemic COVID-19, sehingga pada Maret 2021 tidak terdapat ekspor ke negara tersebut.
- Impor Papua pada Maret 2021 sebesar US\$32,56 juta berupa impor migas senilai US\$16,55 juta dan impor nonmigas US\$16 juta.
- Impor 10 golongan nonmigas utama pada Maret 2021 tercatat senilai US\$14,42 juta.
- Nilai impor dari 7 negara utama pada Maret 2021 sebesar US\$32,46 juta.
- Neraca Perdagangan Papua pada Maret 2021 mengalami surplus sebesar US\$219.45 juta. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

<https://papua.bps.go.id>



SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

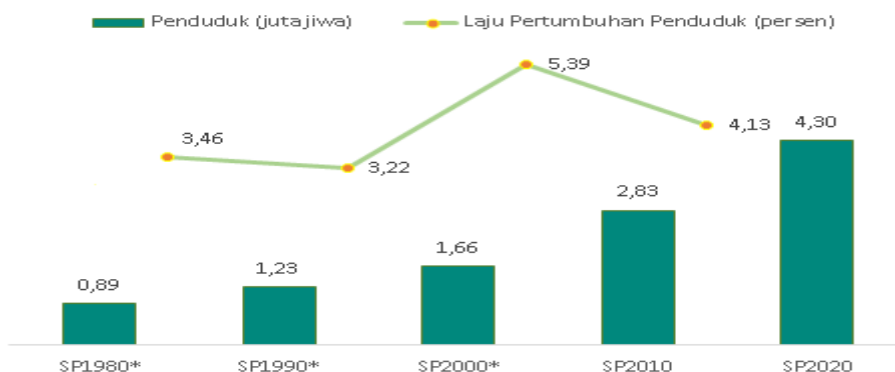
PENDUDUK

“Jumlah penduduk Papua September tahun 2020 mencapai 4,30 juta jiwa”

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

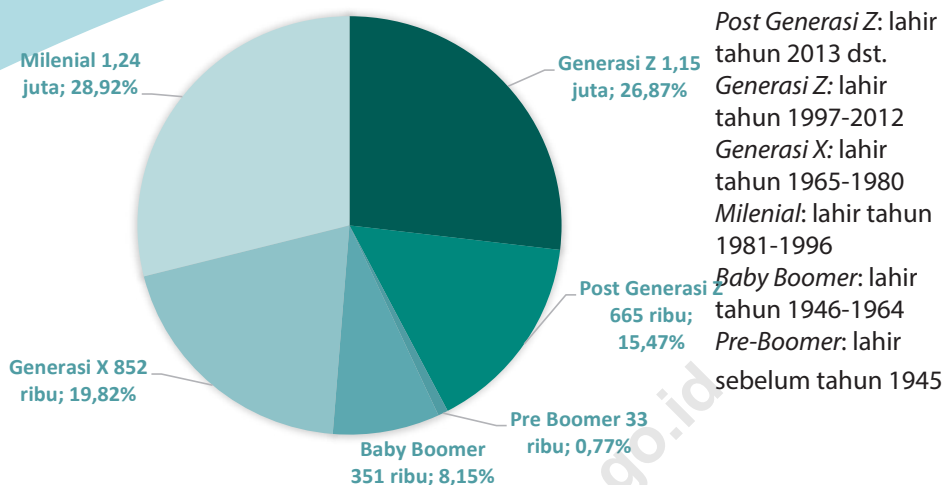
Secara khusus, tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi pada tata kelola SP2020, di antaranya menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada kegiatan pengumpulan data, diantaranya melalui penggunaan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)* dalam Sensus Penduduk (SP) Online, memanfaatkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah kerja statistik SP2020, menyesuaikan jangka waktu tinggal dalam konsep penduduk, dari minimal telah tinggal selama enam bulan menjadi minimal satu tahun, menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit pendataan dan menyusun proses bisnis pengumpulan data yang komprehensif

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020



* masih bergabung dengan Papua Barat

Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020



Adapun beberapa penyesuaian tata kelola terhadap pelaksanaan SP2020 diakibatkan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO, maka SPOnline yang semula di laksanakan pada tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Pendataan penduduk yang semula dilaksanakan pada Juli 2020 dimundurkan ke September 2020 dan Metode pendataan penduduk yang semula direncanakan secara wawancara dan wilayah dibagi menjadi 2 zona dengan mempertimbangkan ketersediaan akses internet, yaitu zona yang menggunakan kuesioner kertas (*paper and pencil interviewing*, PAPI) dan dan zona yang menggunakan elektronik (*computer assisted personal interviewing*, CAPI), akhirnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona 1 *Drop Off and Pick up* (DOPU) kuesioner PAPI, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara.

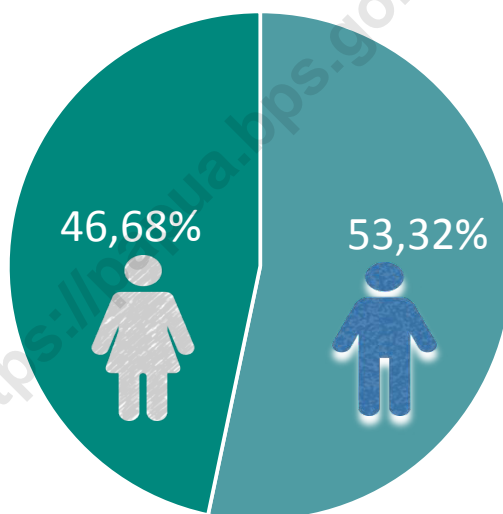
SP2020 mencatat penduduk Papua pada bulan September 2020 sebanyak 4,30 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak 2010, jumlah penduduk Papua bertambah sekitar 1,47 juta jiwa dengan laju pertumbuhan (2010-2020) sebesar 4,13 persen pertahun.

Berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan Kartu Keluarga (KK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari 4,30 juta jiwa sebesar 3,99 juta jiwa (92,83 persen) penduduk Papua berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sisanya sebesar 308 ribu jiwa (7,17 persen) adalah penduduk yang berdomisili tidak sesuai KK/KTP.

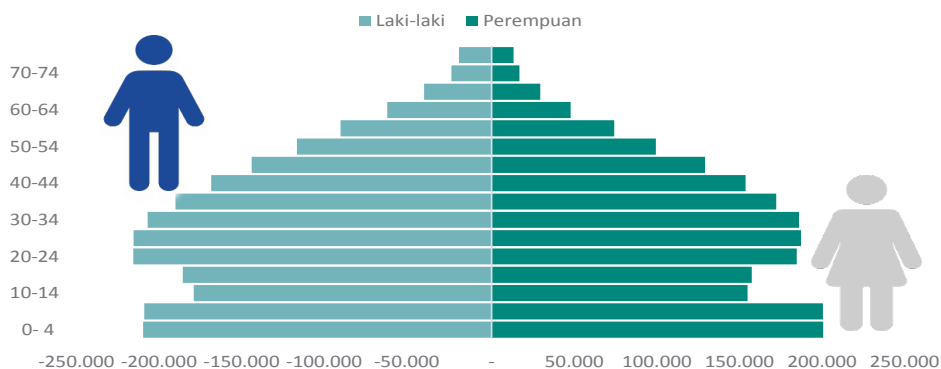
Dilihat dari penduduk menurut generasi, mayoritas penduduk Papua didominasi oleh Milenial dan Generasi Z dengan proporsi masing-masing sebesar 32,09 persen dan 30,38 persen.

SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua sebanyak 2,29 juta jiwa atau 53,32 persen dari total penduduk. Sementara penduduk perempuan sekitar 2 juta orang atau 46,68 persen dari total penduduk Papua. Maka, rasio jenis kelamin penduduk Papua sebesar 114, yang artinya terdapat 114 laki-laki untuk setiap perempuan di Provinsi Papua pada tahun 2020.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (persen)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)



KEMISKINAN

“Persentase penduduk miskin Provinsi pada September 2020 sebesar 26,80 persen, naik 0,16 persen poin dibanding Maret 2020”

Secara umum, pada periode Maret 2012-September 2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari sisi persentase, namun dari jumlah cenderung fluktuatif. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 4,31 persen poin, yaitu dari 31,11 persen atau berjumlah 920,52 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 26,80 persen atau 912,2 ribu jiwa pada September 2020.

Selama enam bulan terakhir persentase penduduk miskin Papua justru mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin yaitu 26,64 persen pada Maret 2020 menjadi 26,80 persen pada September 2020. Sejalan jika dibandingkan dengan September 2019, terjadi kenaikan 0,25 poin persen.

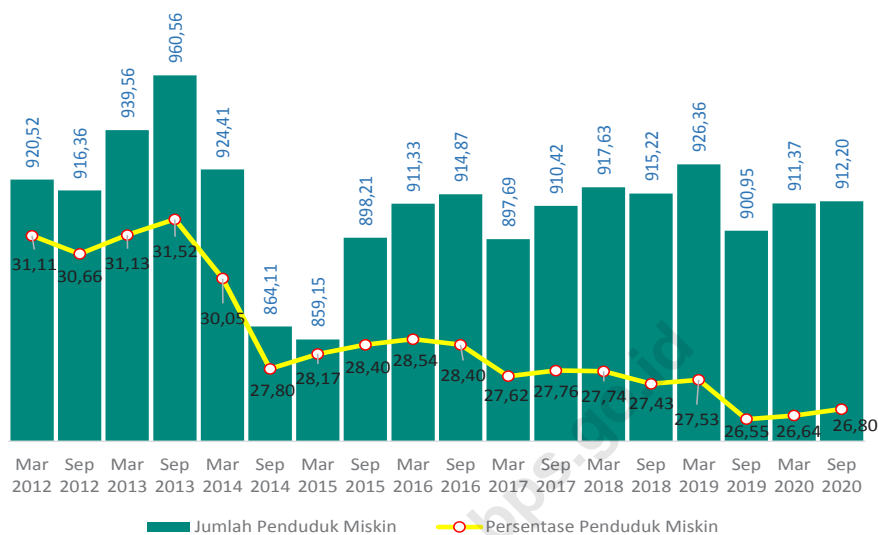
Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada September 2020 terdapat 867,50 ribu jiwa atau 35,69 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 44,73 ribu jiwa atau 4,59 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (Maret 2020), terdapat penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,12 persen poin. Sejalan dengan daerah perdesaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,19 persen poin.

Pada September 2020, persentase penduduk miskin di 3 (tiga) provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 26,80 persen, 21,70 persen dan 21,21 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali sebesar 4,45 persen, diikuti oleh DKI Jakarta 4,69 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Seiring dengan

Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2012 – September 2020



kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua September 2020 adalah Rp580.463,-. Selama Maret 2020 - September 2020 terjadi kenaikan GK, yaitu Rp17.471,- atau sebesar 3,10 persen.

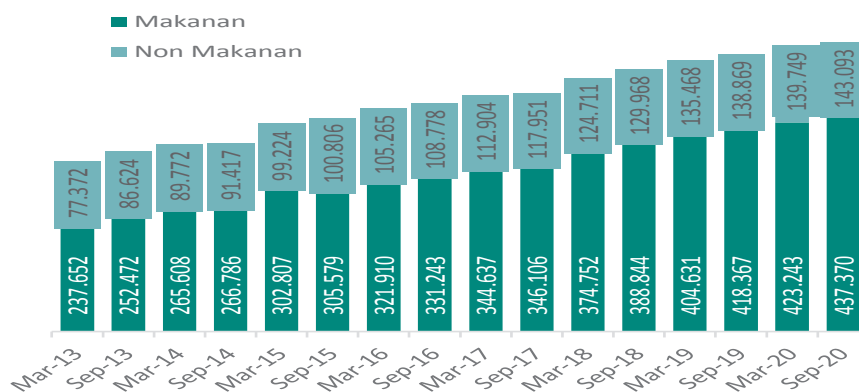
Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar Rp622.346,-. Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang sebesar Rp562.412,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan naik. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 6,157 pada Maret 2020 menjadi 6,902 pada September 2020. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 2,077 menjadi 2,350 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua
Maret 2013-September 2020 (rupiah)**

Periode	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811
Mar-19	588 744	520 117	540 099
Sep-19	603 458	538 088	557 236
Mar-20	611 115	542 695	562 992
Sep-20	622 346	562 412	580 463

**Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi
Papua Maret 2013-September 2020 (rupiah)**



KETIMPANGAN

“Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,395”

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,395. Angka ini meningkat sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,392.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,291 turun 0,005 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,296, dan naik 0,003 poin jika dibanding *Gini Ratio* September 2019 yang sebesar 0,288. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,416, naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,414 dan juga naik 0,006 poin dibanding *Gini Ratio* September 2019 sebesar 0,410.

Pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,72 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,70 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Gini Ratio jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi yaitu sebesar 0,437, sementara provinsi dengan *Gini Ratio* terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,257. Dibanding dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,385 terdapat 7 (tujuh) provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,437), Gorontalo (0,406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388), dan Nusa Tenggara Barat (0,386). Provinsi Papua baik pada periode Maret 2020 maupun September 2020, termasuk salah satu provinsi yang memiliki angka *Gini Ratio* lebih tinggi dari *Gini Ratio* nasional.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

“IDI Provinsi Papua 2019 mencapai angka 65,25, yang berarti capaian kinerja demokrasi Indonesia pada kategori sedang”

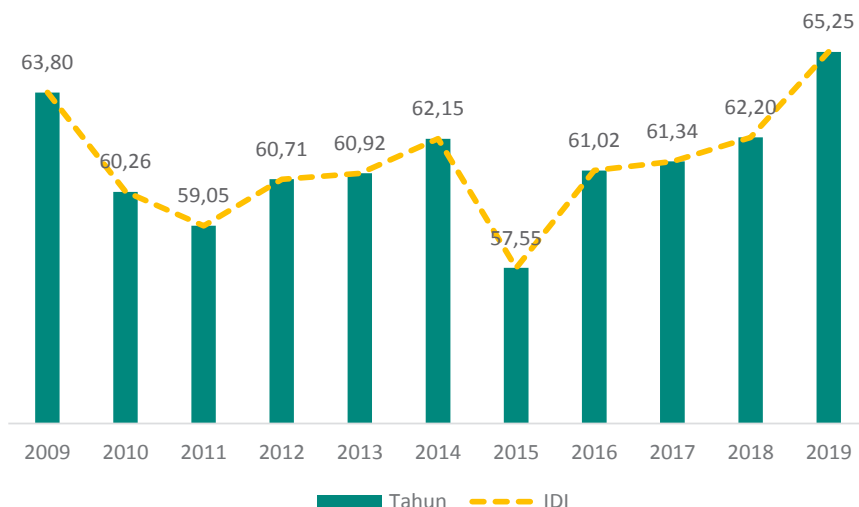
Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data diantaranya, *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub,dll), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

IDI Provinsi Papua tahun 2019 adalah 65,25 meningkat tinggi 3,05 poin dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 62,20. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori ‘sedang’.

IDI dari 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 8,72 poin (dari 84,36 menjadi 93,08), peningkatan aspek Hak-hak Politik sebesar 3,26 poin (dari 47,90 menjadi 51,16) dan dan penurunan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 4,44 poin (dari 57,05 menjadi 52,61).

Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2009-2019



KETENAGAKERJAAN

“Agustus 2020, TPAK Papua sebesar 72,16 persen dan TPT sebesar 4,28 persen”

Pada Agustus 2020, penduduk usia kerja berjumlah sekitar 2.449.145 orang pada Agustus 2020 naik hampir 35ribu orang dibandingkan Agustus 2019 sebesar 2.414.281 orang.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK penduduk laki-laki pada Agustus 2020 lebih tinggi dibandingkan perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 6,15 persen, hal yang sama juga dialami TPAK perempuan yang juga turun sebesar 3,25 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua pada Agustus 2020 sebanyak 1.692.175 orang, kondisi ini menurun dibandingkan Agustus 2019 yang mencapai 1.792.157 orang.

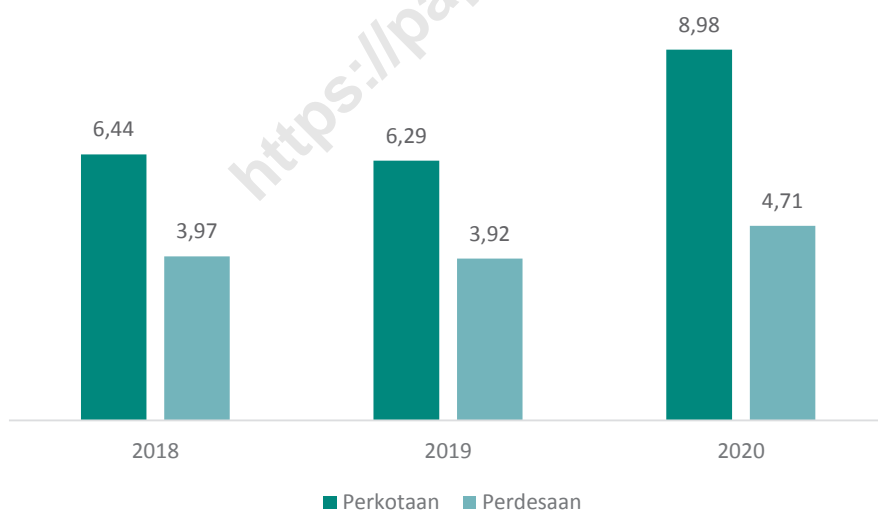
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Agustus 2020 adalah 4,28 persen lebih rendah dari TPT Indonesia yang berada di angka 7,07 persen, tetapi TPT provinsi Papua cenderung meningkat sebesar 0,77 persen dari kondisi yang sama di periode sebelumnya. Peningkatan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peningkatan TPT yang lebih besar terjadi di perkotaan yaitu sekitar 2,69 persen, sedangkan peningkatan TPT di wilayah perdesaan sekitar 0,79 persen. Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 4,99 persen.

Kasus pertama Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan sejak saat itu berbagai daerah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial, dan juga berlaku di Provinsi Papua. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga sektor perekonomian yang menurun setelah adanya pembatasan. Penurunan tersebut berdampak juga pada dinamika ketenagakerjaan. Selama periode Februari-Agustus 2020 ada sekitar 229.617 orang yang merasakan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Papua. Dilihat dari kelompok umur sekitar 83,1 persen penduduk usia kerja merasakan dampak Covid-19 pada semua komponen berada pada kelompok usia dewasa (25-59 tahun).

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Papua

Jenis Kegiatan Usaha	Agustus		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	2 349 469	2 414 281	2 449 145
Angkatan Kerja	1 856 461	1 857 300	1 768 833
Bekerja	1 800 727	1 792 157	1 692 175
Penganggur	55 734	65 143	76 658
Bukan Angkatan Kerja	493 008	556 981	681 742
TPAK (%)	79,02	76,93	72,16
Laki-laki	86,44	85,99	79,84
Perempuan	70,53	66,72	63,47

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah, 2018-2020



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

“IPM Provinsi Papua tahun 2020 sebesar 60,44 dan status pembangunan berada di kategori sedang”

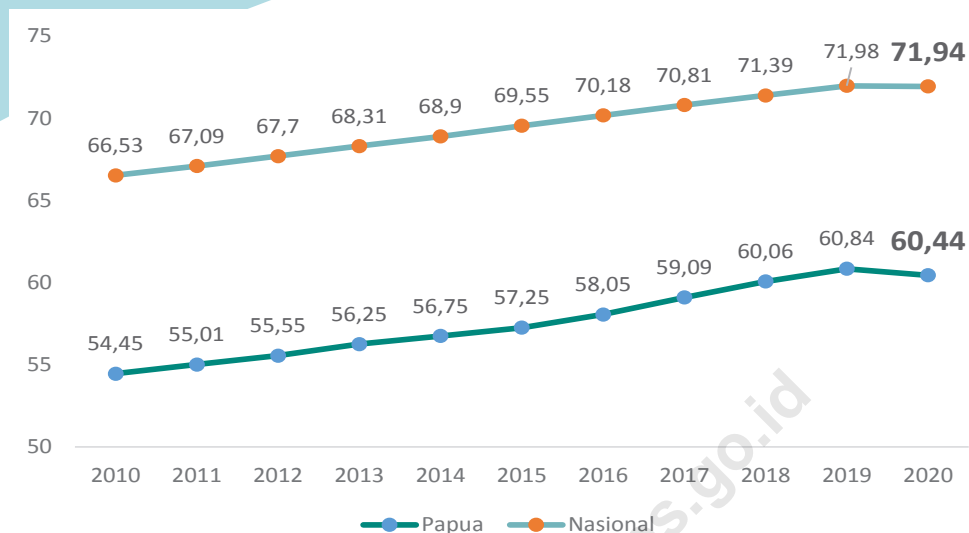
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami

Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2020



kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, akan tetapi pada tahun 2020 IPM Papua menurun dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019-2020 turun sebesar -0,66 persen.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2020 masih belum merata. Dari 29 kabupaten/kota ada 13 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPM, sisanya 16 kabupaten/kota mampu tumbuh atau stabil. Penurunan ini menyebabkan status IPM Kota Jayapura yang pada periode lalu berada pada status "Sangat Tinggi" kini harus turun ke status "Tinggi". Sementara pada periode ini, Kabupaten Merauke justru meningkat statusnya dari "Sedang" ke "Tinggi".

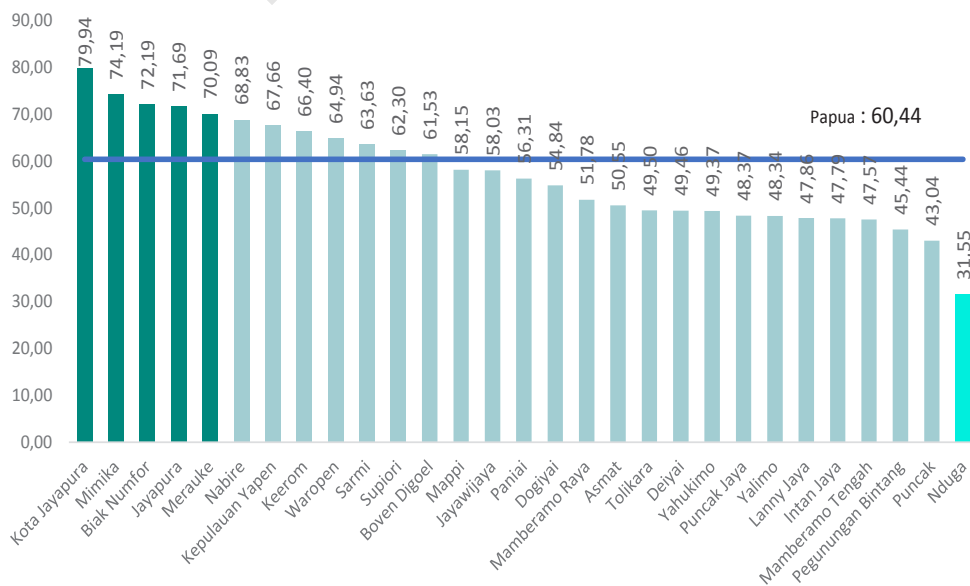
Ada 5 kabupaten/kota dengan status IPM "Tinggi" yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika dan Merauke. Untuk kabupaten/kota dengan status IPM "Sedang" ada sebanyak 7 kabupaten yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu, sebagian besar kabupaten status "Rendah" sebanyak 17 kabupaten yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Mamberamo Raya.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 31,55. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi

Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2020, IPM Kota Jayapura mencapai 79,94. Penurunan ini (-0,27 persen) disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada menurunnya komponen pengeluaran per kapita di Kota Jayapura sebesar 413 ribu

Selama periode 2019-2020, hanya ada 15 kabupaten yang mengalami kenaikan IPM, 1 kabupaten tetap, sementara 13 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (2,60 persen), Puncak (0,80 persen), dan Mamberamo Tengah (0,72 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan paling dalam yaitu Deiyai (-1,30 persen), Dogiyai (-1,03 persen) dan Mamberamo Raya (-0,80 persen). Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2019 hingga 2020, 10 provinsi mengalami penurunan IPM, sedangkan lainnya masih mampu tumbuh. Provinsi dengan kemajuan pembangunan paling cepat yaitu: Provinsi Papua Barat (0,60 persen), Sulawesi Barat (0,58 persen), Sulawesi Selatan (0,38 persen). Sementara, provinsi yang mengalami penurunan paling dalam yakni: Kalimantan Utara (-0,73 persen), Papua (-0,66 persen) dan Kalimantan Timur (-0,48 persen).

Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2020



INDEKS KEBAHAGIAAN

“Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52”

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
(1)	(2)	Personal	Sosial	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98

POTENSI DESA (PODES)

“Tahun 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota”

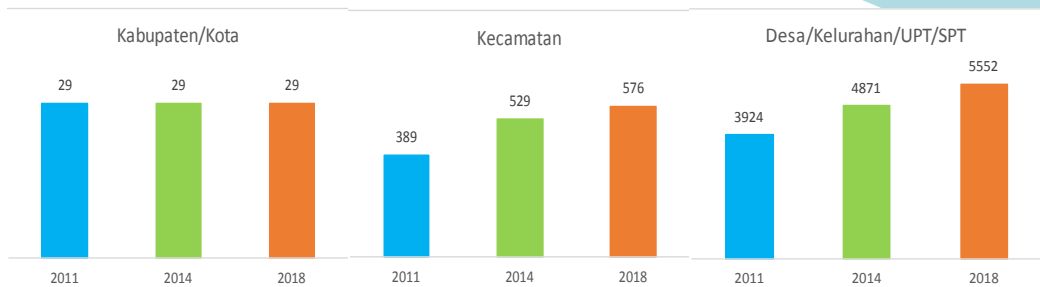
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi

Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018

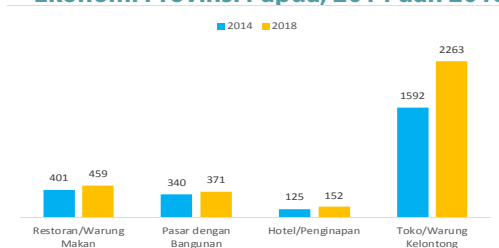


pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

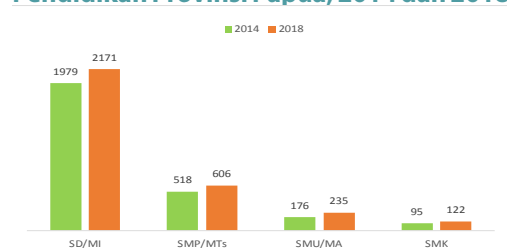
Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

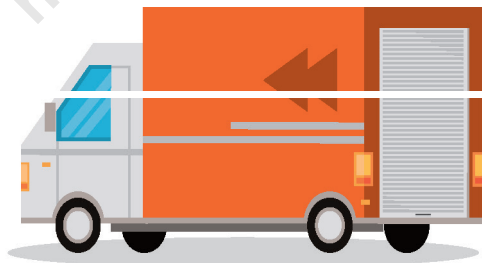
Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





EKONOMI DAN PERDAGANGAN

INFLASI

“Maret 2021, Inflasi Papua sebesar 0,66 persen”

Pada Bulan Maret 2021 gabungan 3 kota IHK dengan menggunakan penghitungan tahun dasar baru tahun 2018, tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66 persen atau terjadi kenaikan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,12 pada Februari 2021 menjadi 105,81 pada Maret 2021. Laju Inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua tahun kalender (Maret 2021 terhadap Desember 2020) mencapai 0,91 persen dan laju inflasi y-o-y (Maret 2021 terhadap Maret 2020) mencapai 2,47 persen.

Inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua pada Maret 2021 terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok transportasi sebesar 0,08 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,37 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,14 persen; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,41 persen.

Faktor pendorong terjadinya inflasi adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: cabai rawit, ikan ekor kuning, ikan cakalang, tomat, kangkung, dan lain-lain. Adapun

Tabel. 4 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua

No	Inflasi	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maret (t) terhadap Desember (t)	0,27	-0,92	0,66
2	Maret (t) terhadap Desember (t-1) (Tahun Kalender)	-0,12	0,09	0,91
3	Maret (t) terhadap Maret (t-1) (Year on Year)	4,17	1,21	2,47

1) Metode agregasi *constant weighting* menggunakan 2 kota IHK dan tahun dasar 2012 (2012=100)

2) Metode agregasi *dynamic weighting* menggunakan 3 kota IHK dan tahun dasar 2018 (2018=100)

komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain: sawi hijau, buah pinang, ikan mumar, udang basah, emas perhiasan, dan lain-lain.

Sementara itu, besaran andil masing-masing kelompok komoditi terhadap perkembangan inflasi bulan Maret 2021 di Papua (gabungan 3 kota IHK) yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,66 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,005 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,003 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,001 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,005 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,06 persen.

Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok	IHK Maret 2021	Inflasi Maret 2021 ⁽¹⁾	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	105,81	0,66	0,66	2,47
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	111,84	1,73	0,66	6,42
2	Pakaian dan Alas Kaki	101,14	0,26	0,01	0,24
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99,89	0,03	0,005	-0,37
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,45	0,20	0,01	1,06
5	Kesehatan	107,42	0,18	0,003	2,50
6	Transportasi	102,43	0,08	0,01	-2,45
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,60	-0,02	-0,001	0,23
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104,69	0,37	0,005	1,12
9	Pendidikan	104,76	0,14	0,01	2,47
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	104,83	0,41	0,02	2,05
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,07	-1,02	-0,06	1,76

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

“Ekonomi Papua tahun 2020 tumbuh 2,32 persen”

Pada tahun 2020, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 198,93 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp. 137,68 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama tahun 2020 ekonomi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mengalami kontraksi sebesar -15,75 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,62 persen. Lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan positif adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 3,72 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,82 persen. Sedangkan 14 kategori lainnya, mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan kategori yang mengalami kontraksi terdalam selama tahun 2020 sebesar -33,63 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -16,93 persen dan Industri Pengolahan sebesar -5,02 persen.

Ekonomi Papua Triwulan IV-2020 dibanding ekonomi triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami pertumbuhan hingga 6,92 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya produksi bijih logam pada triwulan IV tahun 2020 sehingga kategori Pertambangan dan Penggalian tumbuh hingga 44,31 persen. Kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan adalah Jasa Keuangan; Jasa Kesehatan dan Bantuan Sosial; Informasi dan Komunikasi; dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Perekonomian Papua mengalami pertumbuhan selama triwulan IV-2020 dibanding triwulan III-2020 (q-to-q) sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya produksi Bijih Logam PT. Freeport. Pada

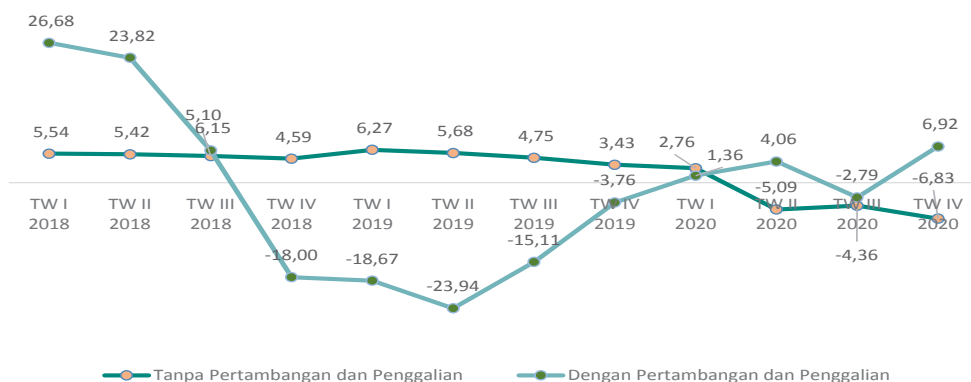
Tabel 6. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2020

No	Kategori	Laju Pertumbuhan (q-to-q)	Laju Pertumbuhan (y-on-y)	Distribusi ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,22	-4,09	11,56
2	Pertambangan dan Penggalian	10,60	44,31	31,87
3	Industri Pengolahan	-2,58	-4,22	1,87
4	Konstruksi	2,94	-4,96	15,15
5	Perdagangan Besar dan Eceran ; Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	1,30	-6,68	9,88
6	Transportasi dan Pergudangan	6,28	-43,17	3,55
7	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,92	-0,92	10,74
8	Lainnya	2,81	-4,54	15,38

Triwulan IV-2020, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat libur natal dan tahun baru serta mulai normalnya kativitas jasa transportasi dan perdagangan.

Nilai PDRB perkapita Papua pada tahun 2020 sebesar Rp 57,9 juta, meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 56,1 juta atau naik sebesar 3,26 persen. Jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita tahun 2020 adalah sebesar Rp 41,53 juta, menunjukkan adanya penurunan sebesar -3,11 persen dari tahun 2019 yang bernilai Rp 42,87 juta.

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan I-2018 – Triwulan IV-2020



B. PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2020 dari sisi pengeluaran sebesar 2,32 persen. Komponen yang mengalami kenaikan pertumbuhan adalah ekspor sebesar 51,18 persen, sementara lainnya mengalami kontraksi. Ekspor tumbuh karena kenaikan ekspor konsentrat (HS 26) yang mencapai 258 persen. Pembatasan sosial untuk pencegahan COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit. Penurunan konsumsi pemerintah karena pemerintah melakukan realokasi anggaran belanja modal untuk penanggulangan COVID-19.

Dilihat dari struktur ekonomi Papua tahun 2020 menurut pengeluaran, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah PK-RT sebesar 50,79 persen. Komponen terbesar kedua adalah PMTB (34,84 persen), diikuti PKP (22,17 persen).

Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan-IV 2020 sebesar 6,92 persen (y-on-y) disebabkan oleh Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 119,28 persen, sementara komponen lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar terjadi pada PKRT sebesar 7,33 persen. Kontraksi pada komponen PK-RT disebabkan oleh pembatasan aktifitas masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak membuat perayaan natal dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Ekonomi Papua Triwulan IV-2020 jika dibandingkan Triwulan III-2020 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan disebabkan kenaikan pertumbuhan beberapa komponen. Pertumbuhan tertinggi ada pada Ekspor Luar Negeri, diikuti PKP dan PMTB.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2020 Provinsi Papua

No	Kategori	Laju Pertumbuhan (q-to-q)	Laju Pertumbuhan (y-on-y)	Distribusi ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,89	-7,33	48,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,42	-1,75	2,15
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,90	-1,65	24,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,86	-4,51	34,30
5	Ekspor Luar Negeri	87,59	119,28	26,82
6	Impor Luar Negeri	23,07	-26,17	1,76

EKSPOR

“ Maret 2021, total ekspor Papua mencapai US\$252 juta”

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Maret 2021 tercatat senilai US\$252 juta atau meningkat sebesar 89,07 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$133,29 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$252 juta. Ekspor bulan ini hanya berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$247,51 juta atau 98,22 persen dari total ekspor Papua.

Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Maret 2021 adalah senilai US\$617,51 juta atau meningkat dibandingkan total ekspor Januari-Maret 2020 yang senilai US\$100,98 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) pada Maret 2021 senilai US\$247,51 juta. Ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Ekspor golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$4,49 juta. Tidak terdapat ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) maupun golongan nonmigas lainnya pada bulan ini.

Nilai kumulatif Januari-Maret 2021 untuk ekspor golongan Bijih Tembaga

Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Januari-Maret 2021

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Mar 2021* thdp Feb 2021	% Perubahan Jan-Mar 2021* thd Jan-Mar 2020	% Peran thd Total Ekspor Jan-Mar 2021*
	Feb' 2021	Mar' 2021*	Jan-Mar 2020	Jan-Mar 2021*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	133,29	252,00	100,98	617,51	89,07	511,52	100,00
Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-100,00	0,00
Non Migas	133,29	252,00	100,98	617,51	89,07	511,53	100,00

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

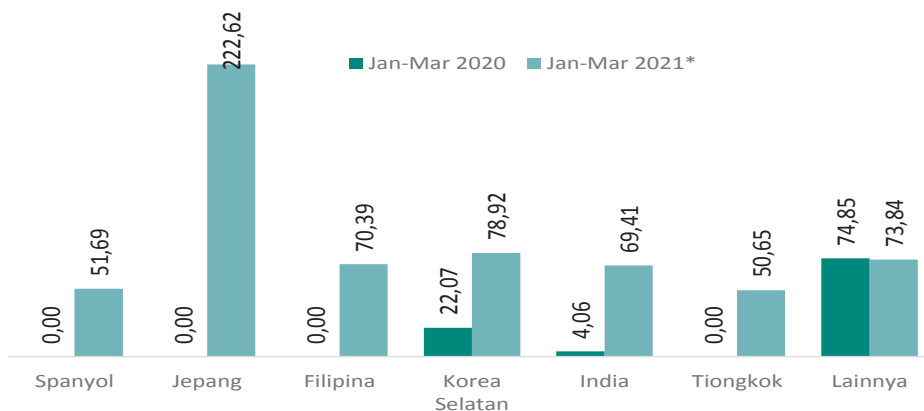
& Konsentrat (HS26) sebesar US\$601,33 juta, nilai ini meningkat 688,31 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena yang sebesar US\$76,28 juta. Nilai kumulatif ekspor Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) menurun sebesar 42,21 persen. Sementara itu, ekspor Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) senilai US\$0,02 juta pada Januari-Maret 2020 sedangkan tidak terdapat ekspor pada Januari-Maret 2021. Golongan Non Migas Lainnya mengalami peningkatan dari US\$4,3 juta pada Januari-Maret 2020 menjadi US\$4,41 juta pada Januari-Maret 2021.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Enam negara utama tujuan ekspor Papua adalah negara Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Ekspor keenam negara utama tersebut pada Maret 2021 tercatat senilai US\$252 juta. Ekspor ke negara lainnya pada Februari 2021 yang sebesar US\$23,15 juta sedangkan pada Maret 2021 tidak terdapat ekspor ke negara lainnya. Sementara itu, tidak terdapat ekspor ke negara tetangga Papua Nugini pada Maret 2021.

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama pada periode Januari-Maret 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan ekspor ke enam negara utama pada Januari-Maret 2020. Sementara ekspor Papua ke negara lainnya mengalami penurunan dari US\$74,85 juta pada Januari-Maret 2020 menjadi US\$73,84 juta pada Januari-Maret 2021. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 88,04 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Maret 2021.

Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-Maret 2020/2021* (Juta US\$)



IMPOR

“Maret 2021, Impor Papua mencapai US\$32,56 juta”

A. Impor Migas dan NonMigas

Impor Papua pada Maret 2021 tercatat senilai US\$32,56 juta yang terdiri dari impor migas senilai US\$16,55 juta dan impor nonmigas senilai US\$16 juta. Dibandingkan Februari 2021, nilai impor Papua mengalami peningkatan sebesar 65,09 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya impor migas sebesar 131,96 persen (naik US\$9,42 juta) dan impor nonmigas yang meningkat sebesar 27,17 persen.

Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$4,36 juta atau sebesar 27,23 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas.

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Impor 10 golongan nonmigas utama yang terdiri dari Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (HS84), Plastik dan bawang dari plastik (HS39), Barang-barang dari besi dan baja (HS73), Kendaraan dan bagiannya (HS87), Mesin/peralatan listrik (HS85), Berbagai produk kimia (HS38), Karet dan barang dari karet (HS40), Perkakas (HS82), Alat optik, fotografi dan Alat kesehatan (HS90) dan Bahan kimia logam (HS28) pada Maret 2021, impor tersebut tercatat senilai US\$14,42 juta atau meningkat 58,74 persen bila dibandingkan Februari 2021 yang sebesar US\$9,09 juta.

Golongan barang nonmigas utama yang mengalami peningkatan nilai impor terbesar adalah golongan Karet dan barang karet (HS40) sebesar

Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Januari-Maret 2021

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Mar 2021* thdp Feb 2021	% Perubahan Jan-Mar 2021* thdp Jan-Mar 2020	% Peran thd Total Impor Jan-Mar 2021*
	Feb' 2021	Mar' 2021*	Jan-Mar 2020	Jan-Mar 2021*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	19,72	32,56	49,88	62,73	65,09	25,76	100,00
Migas	7,14	16,55	18,65	24,57	131,96	31,71	39,17
Non Migas	12,58	16,00	31,22	38,16	27,17	22,21	60,83

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

US\$2,45 juta, Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84) sebesar US\$1,09 juta, dan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$0,81 juta. Nilai impor golongan nonmigas lainnya mengalami penurunan sebesar 54,82 persen atau US\$1,58 juta. Impor golongan nonmigas lainnya yang terbesar berasal dari golongan Sari bahan samak dan celup (HS32) senilai US\$0,51 juta.

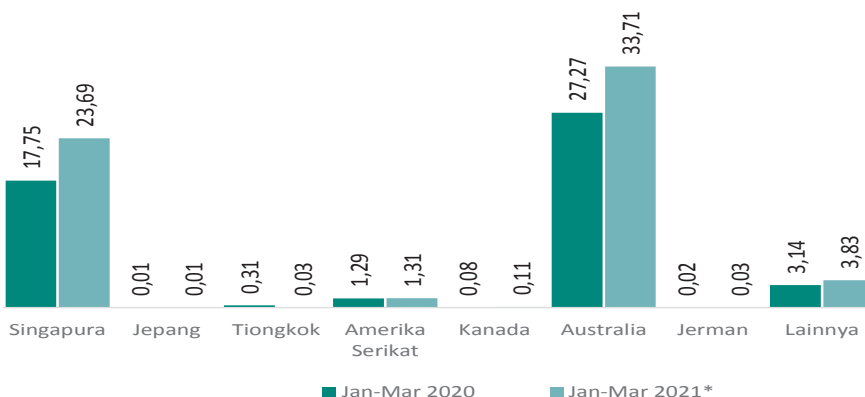
Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-Maret 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 21,11 persen, yaitu dari US\$26,27 juta menjadi US\$31,81 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya yang juga naik sebesar 28,04 persen atau lebih tinggi US\$1,39 juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 50,72 persen terhadap total impor kumulatif Januari-Maret 2021.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada Maret 2021 tercatat sebesar US\$32,46 juta atau menurun 87,45 persen dibandingkan nilainya pada Februari 2021 yang sebesar US\$17,32 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada Maret 2021 adalah Singapura senilai US\$16,55 juta (50,85 persen), Australia senilai US\$15,21 juta (46,71 persen) dan Amerika Serikat dengan impor senilai US\$0,66 juta (2,03 persen).

Total nilai impor kumulatif dari tujuh negara utama pada periode Januari-Maret 2021 adalah sebesar US\$58,9 juta atau lebih tinggi 26 persen bila dibandingkan dengan nilainya pada Januari-Maret 2020 yang sebesar US\$46,74 juta. Total nilai impor kumulatif dari negara lainnya pada periode Januari-Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,14 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari US\$3,14 juta menjadi US\$3,83 juta.

Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Januari - Maret 2020/2021*



NILAI TUKAR PETANI

“Maret 2021, NTP Papua sebesar 102,90”

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

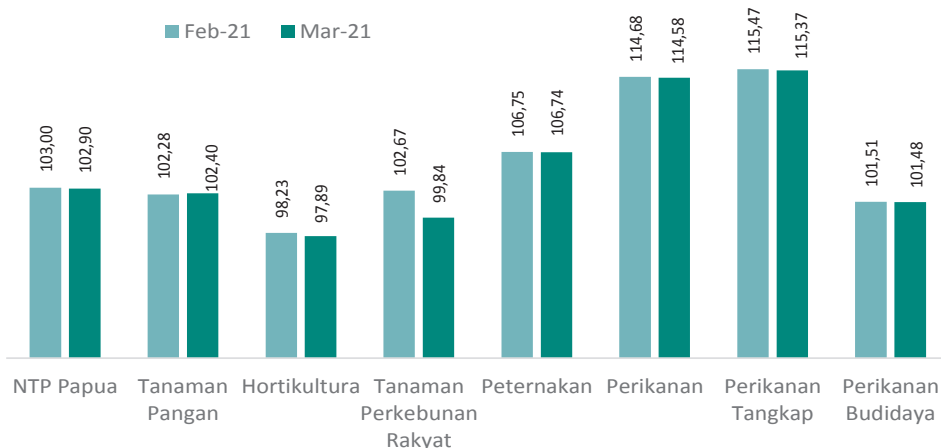
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani.

NTP Papua Maret 2021 tercatat turun -0,10 persen menjadi 102,90 dibandingkan NTP Februari 2021.

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan oleh indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih kecil daripada indeks harga yang diterima petani (It).

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan naik 0,11 persen, hortikultura turun

Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Februari-Maret 2021 (18=100)

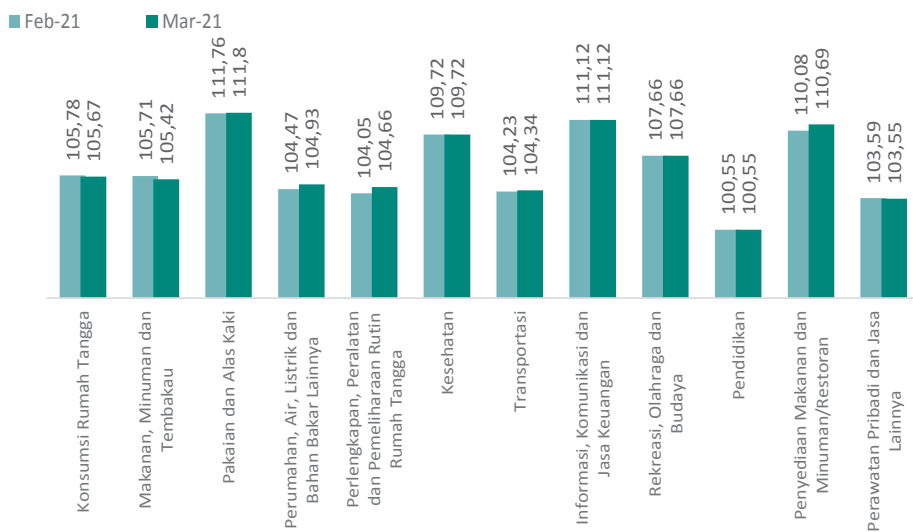


-0,35 persen, tanaman perkebunan rakyat turun -2,76 persen, peternakan turun -0,005 persen, dan subsektor perikanan turun -0,09 persen. Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani. Pada Maret 2021, It Papua sebesar 108,13 atau turun -0,19 persen dibandingkan It Februari. Penurunan It terjadi karena penurunan indeks di semua subsektor. It di subsektor Tanaman Pangan turun -0,01 persen, subsektor Hortikultura turun -0,34 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun -2,75 persen, subsektor Peternakan turun -0,04 persen dan subsektor Perikanan turun -0,11 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib).

Pada Maret 2021, Ib Papua sebesar 105,08 atau turun -0,09 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 105,18. Penurunan IbgabungantersebutdidorongolehIbpadasubsektorTanaman Pangan turun sebesar -0,12 persen, subsektor Hortikultura naik 0,01 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,01 persen, subsektor

Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Februari-Maret 2021 (2018=100)



Peternakan turun 0,03 persen, dan subsektor Perikanan turun -0,02 persen.

B. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Pada Maret 2021, terjadi kenaikan IKRT sebesar -0,10 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh naiknya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

Dari 34 provinsi tercatat 20 provinsi mengalami kenaikan IKRT, 14 provinsi lainnya mengalami penurunan IKRT. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi di Provinsi Bali yaitu sebesar 1,31 persen dan penurunan IKRT terendah terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar -0,47 persen.

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada Maret 2021 adalah 105,60 atau turun sebesar -0,18 persen. Berdasarkan subsektor, tercatat subsektor Tanaman Pangan turun -0,01 persen, subsektor Hortikultura turun -0,34 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun -2,75 persen, subsektor Peternakan turun -0,002 persen dan subsektor Perikanan naik 0,004 persen.

Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian menurut subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Februari-Maret 2021 (2018=100)

Subsektor	Februari 2021	Maret 2021	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	105,04	105,02	-0,01
2. Hortikultura	101,97	101,63	-0,34
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	104,36	101,49	-2,75
4. Peternakan	109,59	109,59	-0,002
5. Perikanan	117,10	117,11	0,004
5.1 Perikanan Tangkap	117,88	117,89	0,01
5.2 Perikanan Budidaya	104,11	104,09	-0,01
NTUP Gabungan	105,79	105,60	-0,18

ANGKUTAN LAUT

“Februari 2021, penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) sebanyak 5.110 orang”

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Indonesia menetapkan tatanan hidup baru atau sistem New Normal sehubungan masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Penetapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga kewajiban setiap penumpang melakukan tes rapid / antigen telah memberikan variasi dinamika jumlah penumpang moda transportasi. Jumlah Penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Februari 2021 tercatat sebanyak 5.110 orang atau turun 41,93 persen, dibanding Januari 2020 sebanyak 8.800 orang.

Penumpang datang dan berangkat dari Pelabuhan Jayapura masing-masing tercatat sebanyak 6.800 orang dan 4.489 orang. Sementara penumpang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Merauke tercatat masing-masing sebanyak 881 orang dan 621 orang.

Jumlah embarkasi kumulatif penumpang angkutan laut pada Januari-Februari 2021 sebanyak 13.910 orang atau menurun 56,12 persen bila dibandingkan dengan Januari-Februari tahun 2020. Sedangkan arus debarkasi penumpang mengalami penurunan sebesar 51,39 persen dari 42.895 orang menjadi 20.851 orang.

Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jan'21 (Orang)	Feb'21 (Orang)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21	Jan'21 (Orang)	Feb'21 (Orang)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	7.831	4.489	-42,68	11.404	6.800	-40,37
Merauke	969	621	-35,91	1.766	881	-50,11
Total	8.800	5.110	-41,93	13.170	7.681	-41,68

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Februari 2021 tercatat sebesar 13.781 ton atau meningkat 22,86 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 11.217 ton.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 11.022 ton atau meningkat 23,15 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 2.759 ton atau meningkat 49,76 persen. Volume barang yang dimuat pada Januari-Februari 2021 menurun 25,43 persen bila dibandingkan dengan Januari-Februari 2020 sebesar 33.524 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura sebesar 12,86 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 52,6 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Februari 2021 sebesar 112.237 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada Februari 2021 tercatat sebesar 86.864 ton atau naik 22,86 persen dibandingkan Januari 2021 yang sebesar 70.703 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 25.373 ton atau turun 1,7 persen. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke pada Januari-Februari 2021 sebesar 208.753 ton atau menurun 10,27 persen dibandingkan Januari-Februari 2020 yang sebesar 232.645 ton.

Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2021

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jan'21 (Ton)	Feb'21 (Ton)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21	Jan'21 (Ton)	Feb'21 (Ton)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	70.703	86.864	22,86	8.950	11.022	23,15
Merauke	25.813	25.373	-1,70	2.267	2.759	21,70
Total	96.516	112.237	16,29	11.217	13.781	22,86

ANGKUTAN UDARA

“Februari 2021, penumpang berangkat (angkutan udara dalam negeri) sebanyak 73.858 orang”

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Indonesia menetapkan tatanan hidup baru atau sistem New Normal sehubungan masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Dilihat dari jumlah penumpang berangkat dan datang transportasi udara cukup bervariasi. Hal ini di karenakan transportasi udara di ijinakan beroperasi namun dengan beberapa pembarasan dan persyaratan seperti mengisi aplikasi *e-hac*, menunjukkan hasil Tes PCR/Rapid, dan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM). Jumlah Penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Februari 2021 tercatat sebanyak 73.858 orang, menurun 14,02 persen dibanding Januari 2021 sebanyak 85.901 orang.

Penumpang datang dan berangkat dari Bandara Sentani masing-masing tercatat sebanyak 44.137 orang dan 44.202 orang, di Bandara Mopah tercatat masing-masing 6.886 orang dan 6.891 orang. Sementara penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Mozes Kilangin tercatat masing-masing sebanyak 22.270 orang dan 22.765 orang.

Tabel 13. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Februari 2021

Bandara	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jan'21 (Orang)	Feb'21 (Orang)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21	Jan'21 (Orang)	Feb'21 (Orang)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	54.968	44.202	-19,59	61.711	44.137	-28,48
Mopah	8.038	6.891	-14,27	8.352	6.886	-17,55
Mozes Kilangin	22.895	22.765	-0,57	28.309	22.270	-21,33
Total	85.901	73.858	-14,02	98.372	73.293	-25,49

Jumlah embarkasi kumulatif penumpang angkutan udara pada Januari-Februari 2021 sebanyak 159.759 orang atau menurun 22,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Sedangkan arus debarkasi kumulatif penumpang Januari-Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 17,25 persen menjadi 171.665 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Februari 2021 tercatat sebesar 9.413 ton atau menurun 8,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10.296 ton.

Dilihat menurut bandara, volume muat barang di Bandara Sentani, tercatat sebesar 8.207 ton atau menurun 8,93 persen. Sedangkan di Di Bandara Mopah, volume muat barang tercatat sebesar 46 ton. Di Bandara Mozes Kilangin, volume muat barang tercatat sebesar 1.160 ton.

Volume barang yang dibongkar pada Februari 2021 sebesar 1.077 ton. Di Bandara Sentani, volume bongkar barang pada Februari 2021 tercatat sebesar 692 ton atau turun 12,51 persen dibandingkan Januari 2021 yang sebesar 791 ton. Di Bandara Mopah, volume bongkar barang tercatat sebesar 77 ton atau turun 14,81 persen. Di Bandara Mozes Kilangin, volume bongkar barang Februari 2021 tercatat 308 ton atau turun 24,56 persen dibandingkan Januari 2021.

Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Februari 2021

Bandara	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jan'21 (Ton)	Feb'21 (Ton)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21	Jan'21 (Ton)	Feb'21 (Ton)	% Perubahan Feb21*thd Jan'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	791	692	-12,51	9.012	8.207	-8,93
Mopah	90	77	-14,81	50	46	-9,61
Mozes Kilangin	408	308	-24,56	1.234	1.160	-6,00
Total	1.289	1.077	-16,48	10.296	9.413	-8,58

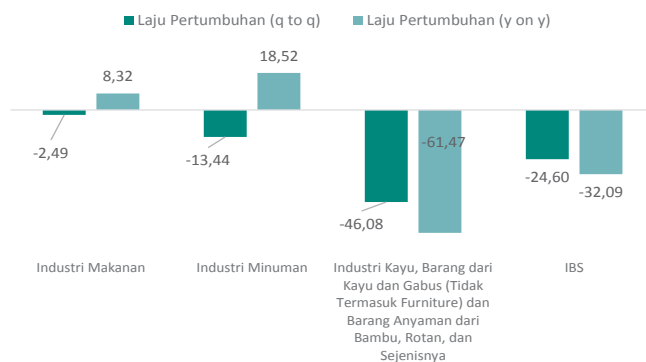
INDUSTRI MANUFAKTUR

“Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen”

A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salah satu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusuhan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya, yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019.

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019. Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55

catatan:

** Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi

POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

“Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di Provinsi Papua pada tahun 2019 untuk komoditas beras 22,23 persen; cabai merah 34,47 persen; bawang merah 30,09 persen; dan daging ayam ras 36,38 persen”

Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) 2020 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total produsen sampai dengan konsumen akhir pada suatu wilayah. Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2019, dengan responden produsen dan pedagang yang tersebar di 6 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih di Provinsi Papua.

Komoditas strategis dalam survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Komoditas yang terpilih adalah beras, cabai, bawang merah dan daging ayam ras.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di Provinsi Papua pada tahun 2019 untuk komoditas beras sebesar 22,23 persen; cabai merah 34,47 persen; bawang merah 30,09 persen; dan daging ayam ras 36,38 persen.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di nasional pada tahun 2019 sebesar 22,34 persen; cabai merah 61,31 persen; bawang merah 38,01 persen; dan daging ayam ras 25,53 persen.

Tabel 16. Tabel Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2019

Komoditas (1)	Pola Distribusi Perdagangan (2)
Beras	Produsen -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Cabai Merah	Petani -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Bawang Merah	Luar Provinsi -> Sub Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Daging Ayam Ras	Luar Provinsi -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir

PERTANIAN



TANAMAN PANGAN

“Luas panen padi sebesar 52.728 hektar dengan produksi sebesar 166.002 ton GKG (Angka Tetap)”

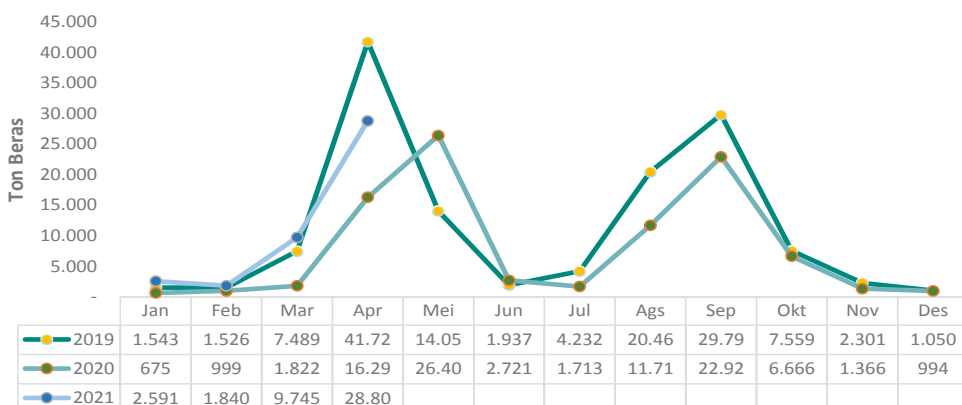
Penghitungan angka produksi Padi tahun 2020 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

Berdasarkan hasil survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 52.728 hektar. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Mei, yaitu mencapai 15.471 hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 14.887 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua dari Januari-Desember 2020 sebesar 166.002 ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami penurunan sekitar 69.337 ton (29,46 persen) dibandingkan tahun 2019. Produksi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Mei yaitu 46.476 ton dan yang terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 1.188 ton.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi dari Januari-Desember 2020 setara dengan 94.297 ribu ton beras dan potensi produksi beras sepanjang Februari-April 2021 sebesar 40.393 ton beras.

Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2020



PENJELASAN TEKNIS



PENJELASAN TEKNIS

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Semarang sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2019 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 218,59. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 493,31. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kota Jayapura dengan nilai IKK sebesar 121,49.

B. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

C. Nilai Tukar Petani (NTP)

Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.

Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi *Classification of Individual Consumption According to Purpose* 2018 (COICOP 2018). COICOP 2018 merupakan referensi

internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.

<https://papua.bps.go.id>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2016 - 2020

Jenis Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial					
Jumlah penduduk (jiwa)	3.207.444*	3.265.444*	3.322.526*	3.379.302*	4.303.707**
IPM	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44
1. AHH saat lahir (tahun)	65,12	65,14	65,36	65,65	65,79
2. Harapan lama sekolah (tahun)	10,23	10,54	10,83	11,05	11,08
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,15	6,27	6,52	6,65	6,69
4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.637	6.996	7.159	7.336	6.954
Angkatan kerja (jiwa)					
Februari	1.743.160	1.753.858	1.851.486	1.808.848	1.830.409
Agustus	1.722.162	1.762.841	1.835.963	1.857.300	1.768.833
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
Februari	78,77	77,30	79,38	76,04	75,23
Agustus	76,70	76,94	79,11	76,92	72,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Februari	2,97	3,96	2,91	3,42	3,62
Agustus	3,35	3,62	3,20	3,51	4,28
Persentase penduduk miskin (persen)					
Maret	28,54	27,62	27,74	27,53	26,64
September	28,40	27,76	27,43	26,55	26,80
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
Maret	427.176	457.541	499.463	540.099	562.992
September	440.021	464.056	518.811	557.236	580.463
Distribusi pendapatan					
Maret					
40 % berpendapatan rendah	14,36	14,71	15,55	15,35	15,62
40 % berpendapatan sedang	42,38	41,13	41,03	40,10	39,73
20 % berpendapatan tinggi	43,26	44,16	43,42	44,55	44,66
September					
40 % berpendapatan rendah	15,15	15,18	14,77	15,74	15,72
40 % berpendapatan sedang	40,01	39,97	40,67	39,34	39,48
20 % berpendapatan tinggi	44,84	44,85	44,57	44,92	44,80
Gini Ratio					
Maret	0,390	0,397	0,384	0,394	0,392
September	0,399	0,398	0,398	0,391	0,395

Keterangan:

*Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010

*Angka Hasil Sensus Penduduk (SP) September 2020

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020 (lanjutan)

Jenis Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial					
Perkembangan Ekonomi					
Ekspor-Impor					
Ekspor (Juta US\$)	2.004,04	2.454,59	3.856,46	1.209,74	1.917,37
Januari-Desember 2020					
Impor (Juta US\$)	1.907,96	446,51	521,87	355,33	199,46
Januari-Desember 2020					
Neraca Perdagangan (Juta US\$)	96,08	2.008,08	3.334,5	854,41	1.717,91
Januari-Desember 2020					
Inflasi					
Inflasi Kota Jayapura	4,13	2,41	6,70	0,66	1,77
Inflasi Kabupaten Merauke	0,82	1,25	5,42	0,86	3,36
Inflasi Kabupaten Timika	-	-	-	-	1,13
Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
Dengan Tambang (Persen)	9,14	4,64	7,32	-15,75	2,32
Tanpa Tambang (Persen)	6,44	5,17	5,14	4,98	-3,51
PDRB Berlaku					
Dengan Tambang (miliar Rp)	173.208,86	188.938,08	210.600,57	189.505,27	198.905,28
Tanpa Tambang (miliar Rp)	114.183,51	122.457,68	133.440,14	144.863,52	142.683,47
PDRB Harga Konstan					
Dengan Tambang (miliar Rp)	142.224,93	148.818,29	159.711,85	134.562,24	137.677,57
Tanpa Tambang (miliar Rp)	82.384,56	86.644,23	91.100,68	95.637,19	92.282,49

LAMPIRAN 2

Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2021

Jenis Indikator	Satuan	2021											
		Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun'	Jul'	Agu'	Sep'	Okt'	Nov'	Des'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ekonomi													
Ekspor	Juta US\$	232,22	133,29	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impor	Juta US\$	10,45	18,96	32,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neraca Perdagangan	Juta US\$	221,77	114,33	219,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflasi													
Inflasi Gabungan	Persen	-0,27	0,53	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflasi Kota Jayapura	Persen	-0,42	0,72	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflasi Kabupaten Merauke	Persen	-0,09	0,46	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflasi Kabupaten Timika	Persen	-0,07	0,13	-0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertumbuhan Ekonomi													
Dengan Tambang	Persen	-	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanpa Tambang	Persen	-	-3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PDRB ADHB													
Dengan Tambang	Miliar Rp	-	198.928,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanpa Tambang	Miliar Rp	-	142.683,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Manufaktur Besar dan Sedang													
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	220.006	223.389	225.714	227.411	230.932
2	Jayawijaya	210.229	212.811	214.994	217.887	269.553
3	Jayapura	123.780	125.975	128.587	131.802	166.171
4	Nabire	142.795	145.101	147.921	150.308	169.136
5	Kepulauan Yapen	93.114	95.007	97.412	101.204	112.676
6	Biak Numfor	141.801	144.697	148.404	152.401	134.650
7	Paniai	167.325	170.193	173.392	177.410	220.410
8	Puncak Jaya	119.779	123.591	126.113	129.300	224.527
9	Mimika	205.591	210.413	215.493	219.689	311.969
10	Boven Digoel	64.674	66.209	67.717	69.211	64.285
11	Mappi	93.592	94.671	99.599	103.292	108.295
12	Asmat	90.316	92.909	95.606	97.490	110.105
13	Yahukimo	184.217	187.021	189.092	190.887	350.880
14	Pegunungan Bintang	72.511	73.473	74.396	75.788	77.872
15	Tolikara	133.786	136.576	137.695	139.111	236.986
16	Sarmi	37.511	38.210	39.406	40.515	41.515
17	Keerom	54.130	55.018	55.799	57.100	61.623
18	Waropen	28.803	29.480	30.612	31.514	33.943
19	Supiori	18.486	19.104	20.018	20.710	22.547
20	Memberamo Raya	21.821	22.313	23.307	24.086	36.483
21	Nduga	95.885	97.012	97.517	98.595	106.533
22	Lanny Jaya	174.782	176.687	177.682	178.995	196.399
23	Mamberamo Tengah	46.696	47.487	48.090	48.201	50.685
24	Yalimo	59.778	60.822	61.115	62.605	101.973
25	Puncak	105.521	107.822	111.182	113.204	114.741
26	Dogiyai	93.809	94.997	96.590	97.902	116.206
27	Intan Jaya	47.300	48.318	48.812	49.292	135.043
28	Deiyai	70.620	72.206	72.486	73.199	99.091
29	Kota Jayapura	288.786	293.690	297.775	300.192	398.478
	Provinsi Papua	3.207.444	3.265.202	3.322.526	3.379.302	4.303.707

¹⁾ angka hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010)

^{**)} angka hasil Sensus Penduduk (SP September 2020)

LAMPIRAN 4

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	179,69	168,31	156,56	153,05	150,93
2	Jayawijaya	282,04	290,37	311,96	304,65	295,03
3	Jayapura	128,93	137,54	125,98	123,98	120,87
4	Nabire	152,00	147,53	150,45	148,12	138,70
5	Kepulauan Yapen	144,48	144,96	142,25	149,24	142,53
6	Biak Numfor	153,00	142,21	134,88	132,35	129,53
7	Paniai	215,29	225,31	250,29	241,21	229,51
8	Puncak Jaya	423,41	436,94	464,12	459,89	449,51
9	Mimika	156,16	148,00	150,54	133,19	125,93
10	Boven Digoel	181,24	171,29	161,96	162,63	159,84
11	Mappi	190,36	180,53	167,70	152,24	152,02
12	Asmat	220,75	231,32	213,94	202,28	179,68
13	Yahukimo	229,55	242,78	220,02	205,60	192,81
14	Pegunungan Bintang	379,97	391,44	368,02	364,25	356,01
15	Tolikara	351,04	351,23	377,27	360,48	336,37
16	Sarmi	200,31	188,91	163,77	145,09	138,83
17	Keerom	157,21	160,94	147,62	141,98	134,14
18	Waropen	154,47	163,01	186,5	171,32	143,14
19	Supiori	160,77	150,79	149,02	138,44	130,43
20	Memberamo Raya	182,07	192,76	208,29	193,19	184,27
21	Nduga	326,15	318,34	325,36	307,41	297,45
22	Lanny Jaya	325,43	332,92	337,65	333,55	317,27
23	Mamberamo Tengah	392,84	403,74	429,33	422,66	391,82
24	Yalimo	352,28	343,90	370,50	362,18	349,27
25	Puncak	454,67	469,96	498,98	493,31	492,62
26	Dogiyai	204,28	209,49	236,53	224,53	213,51
27	Intan Jaya	397,57	412,52	441,38	439,11	438,39
28	Deiyai	218,81	229,29	253,83	238,89	229,01
29	Kota Jayapura	150,07	147,06	132,86	121,49	120,20
	Provinsi Papua	239,98	229,82	227,90	218,59	208,90

LAMPIRAN 5

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2015-2020

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2020 (8)
1	Merauke	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98	70,09
2	Jayawijaya	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03
3	Jayapura	70,04	70,50	70,97	71,25	71,84	71,69
4	Nabire	66,49	66,64	67,11	67,70	68,53	68,83
5	Kepulauan Yapen	65,28	65,55	66,07	67,00	67,76	67,66
6	Biak Numfor	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57	72,19
7	Paniai	54,20	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31
8	Puncak Jaya	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37
9	Mimika	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19
10	Boven Digoel	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53
11	Mappi	56,11	56,54	57,10	57,72	58,30	68,15
12	Asmat	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37	50,55
13	Yahukimo	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37
14	Pegunungan Bintang	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21	45,44
15	Tolikara	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,50
16	Sarmi	60,99	61,27	62,31	63,00	63,45	63,63
17	Keerom	63,43	64,10	64,99	65,75	66,59	66,40
18	Waropen	62,35	63,10	64,08	64,80	65,34	64,94
19	Supiori	60,09	60,59	61,23	61,84	62,30	62,30
20	Memberamo Raya	48,29	49,00	50,25	51,24	52,20	51,78
21	Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55
22	Lanny Jaya	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00	47,86
23	Mamberamo Tengah	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23	47,57
24	Yalimo	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34
25	Puncak	39,41	39,96	41,06	41,81	42,70	43,04
26	Dogiyai	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84
27	Intan Jaya	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79
28	Deiyai	48,28	48,50	49,07	49,55	50,11	49,46
29	Kota Jayapura	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94
	Provinsi Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44

LAMPIRAN 6

PDRB Perkapita (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018*	2019*	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	53.078.198,97	57.658.155,57	64.403.705,24	70.465.785,56	70.122.905,14
2	Jayawijaya	29.161.656,98	31.966.401,39	35.415.271,07	38.237.410,79	37.055.632,89
3	Jayapura	92.994.178,45	102.331.005,50	113.007.934,27	124.389.430,49	116.597.939,01
4	Nabire	60.346.153,97	65.361.352,34	69.908.072,16	73.743.380,60	73.282.592,19
5	Kepulauan Yapen	35.946.633,63	38.005.195,82	40.114.737,62	41.999.970,51	40.254.994,63
6	Biak Numfor	35.627.422,40	34.499.144,50	34.930.879,39	35.997.188,57	33.645.475,38
7	Paniai	19.599.038,08	20.741.036,90	22.462.852,42	23.571.368,84	23.746.723,79
8	Puncak Jaya	9.384.126,04	9.766.576,66	10.316.102,78	10.863.248,58	10.387.832,77
9	Mimika	315.981.759,90	352.769.406,16	395.993.721,40	249.600.755,06	283.522.446,62
10	Boven Digoel	60.582.064,59	64.411.696,37	67.435.795,70	70.435.498,90	67.421.167,24
11	Mappi	23.205.239,84	25.654.125,49	26.852.997,93	28.634.153,45	27.429.162,86
12	Asmat	20.286.651,41	21.938.123,87	23.626.517,20	25.344.489,01	26.009.527,50
13	Yahukimo	10.015.819,06	10.956.991,82	11.803.069,86	12.687.628,59	13.011.014,56
14	Pegunungan Bintang	20.274.951,77	22.051.088,02	23.700.771,49	25.249.498,62	25.704.338,43
15	Tolikara	9.223.135,51	9.861.303,81	10.627.506,78	11.452.375,34	11.916.373,96
16	Sarmi	54.872.042,05	59.990.021,67	64.315.850,93	69.596.245,41	71.300.058,05
17	Keerom	43.158.726,32	46.182.136,00	48.422.111,60	50.013.478,92	50.550.001,66
18	Waropen	55.600.644,53	59.792.941,40	62.601.875,94	65.138.441,48	63.772.030,72
19	Supiori	44.922.394,76	46.754.638,83	47.294.857,83	48.728.431,15	49.180.943,59
20	Memberamo Raya	54.489.881,63	59.778.066,95	63.708.877,65	68.361.142,03	69.635.961,56
21	Nduga	9.474.740,84	10.504.868,68	11.469.337,55	12.339.059,42	12.735.382,36
22	Lanny Jaya	7.912.642,87	8.661.891,10	9.435.175,66	10.217.416,98	10.733.832,84
23	Mamberamo Tengah	19.265.806,98	20.823.205,72	22.468.981,84	24.141.666,17	24.889.864,46
24	Yalimo	15.317.323,67	16.559.570,23	18.254.273,14	19.510.165,18	20.156.440,10
25	Puncak	9.756.558,61	10.667.499,68	11.569.147,43	12.374.228,54	12.469.769,25
26	Dogiyai	10.680.684,94	11.566.519,52	12.503.498,16	13.413.738,95	13.654.996,15
27	Intan Jaya	21.579.591,89	22.489.277,23	24.251.939,80	25.331.360,09	25.172.926,22
28	Deiyai	15.053.256,09	16.028.574,07	17.484.748,86	18.977.539,66	19.301.685,75
29	Kota Jayapura	90.135.176,33	95.737.108,34	102.166.321,11	107.838.040,54	106.026.392,23

*angka sementara

**angka sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490
E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>



9 772477 447008